

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya merupakan multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Untuk mencapai sasaran yang di inginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi (Todaro, 2000).

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara peran tenaga kerja sangat penting, tenaga kerja merupakan pendorong pembangunan ekonomi. Dalam teori klasik mengungkapkan bahwa manusia merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah tidak akan ada artinya jika tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengolahnya. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith, juga menyatakan bahwa alokasi sumber daya manusia yang bersifat efektif adalah awal dari pembangunan ekonomi. Jika sumber daya manusia dapat bersifat efektif maka akan mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah faktor utama dalam pembangunan.

Tenaga kerja menjadi faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Tanpa adanya tenaga kerja, proses produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Namun tenaga kerja yang melimpah juga bisa menimbulkan berbagai masalah seperti jumlah pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, mutu tenaga kerja rendah dan lain sebagainya. Masalah tersebut menjadi penghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Sumarsono, 2003).

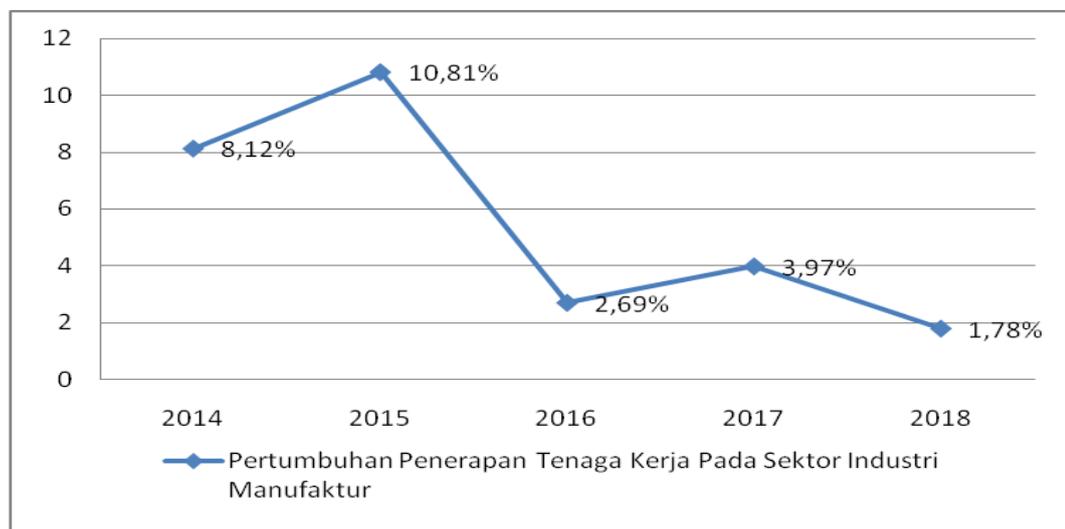
Melonjaknya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dan ditambah dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan belum berfungsinya semua sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan belum meratanya pembangunan disegala bidang sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Adanya peran berbagai sektor kurang mampu memenuhi dan menyerap angkatan kerja secara maksimal disebabkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang sangat cepat dan lapangan kerja yang tersedia. Dalam masalah penyerapan tenaga kerja akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi. Sektor industri manufaktur atau pengolahan digambarkan akan menjadi sektor yang mempunyai peran penting karena dilihat mampu menyerap sebagian besar jumlah penduduknya yang dilakukan pada sektor industri pengolahan walaupun hasilnya belum maksimal.

Industrialisasi mulai menjadi sektor unggulan terutama di negara berkembang seperti di Indonesia, dengan tujuan dapat menyerap tenaga kerja yang

semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Industri secara umum dapat diartikan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau pengolahan barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai yang lebih tinggi nilainya. Tujuan lainnya agar dapat tercapai melalui pembangunan industri adalah semakin luasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat sendiri dinilai cukup besar dan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Adapun laju pertumbuhan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa laju pertumbuhan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Jawa Barat tahun 2014-2018 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan penyerapan kerja paling tinggi yaitu pada

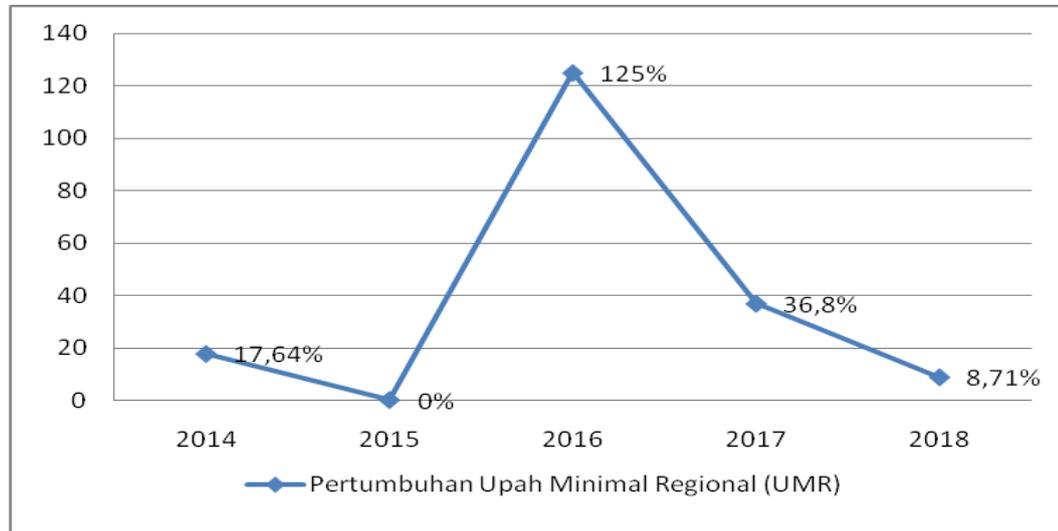
tahun 2015 yaitu sebesar 10,81% atau sebesar 1,588,155 jiwa. Tahun 2018 merupakan angka terendah penyerapan tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 1,78% atau sebesar 1,457,658 jiwa. Jumlah produksi pada tahun 2018 mengalami peningkatan tetapi laju pertumbuhan tenaga kerja mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya pergantian fungsi produksi pada tahun tahun 2018 yang lebih tertuju pada pembelian mesin sehingga berdampak menurunnya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2018 pada sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat mengalami fluktuasi dalam 5 Tahun terakhir hal ini disebabkan karena adanya pergantian fungsi produksi yaitu penggunaan tenaga kerja manusia beralih ke teknologi, dimana penggunaan teknologi dan mesin-mesin yang lebih modern dapat menyebabkan penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Jawa Barat yaitu upah. Teori upah menjelaskan bahwa upah ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri, upah yang tinggi membuat biaya produksi industri juga meningkat. Mengakibatkan harga suatu produk juga meningkat, hal ini menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja.

Upah minimum regional merupakan upah yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2007). Selanjutnya, upah

minimum Jawa barat dijelaskan dalam Gambar 1.2, dimana upah minimum yang dimaksud adalah rata-rata upah minimum provinsi di Provinsi Jawa Barat.



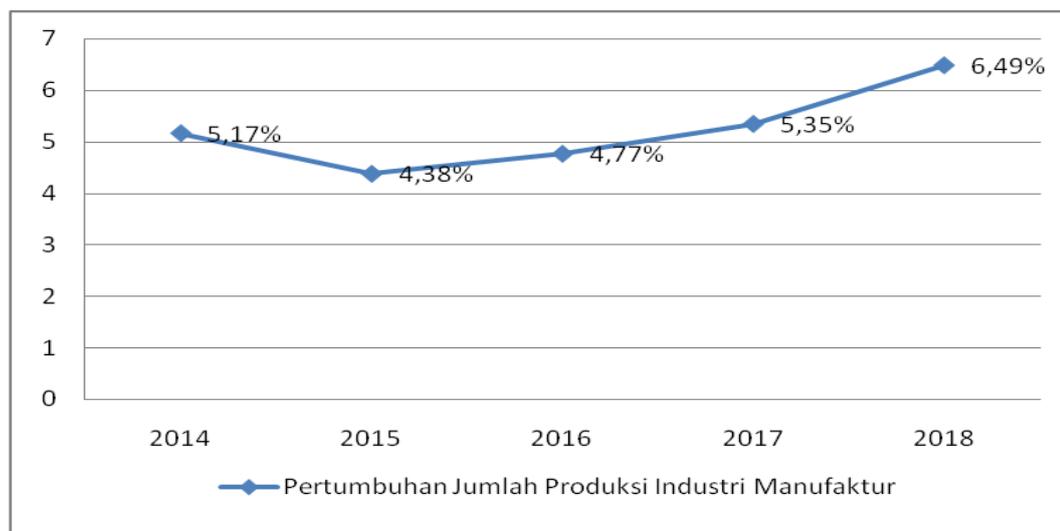
Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2014-2018)

Pada Gambar 1.2 memperlihatkan pertumbuhan upah minimum provinsi di Jawa Barat yang cenderung meningkat di setiap tahunnya, dan pada tahun 2016 upah minimum provinsi di Jawa Barat menjadi 125% mengalami kenaikan yang cukup tajam atau sebesar Rp 2.250.000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 36,8% atau besar Rp 1,420,635. Kenaikan upah minimum atau penurunan upah minimum salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Selain upah minimum provinsi, faktor lain yang mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah total output atau jumlah produksi. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan dimana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja dan *skill* (Assauri, 1980). Apabila

jumlah produksi meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi akan meningkat. Semakin besar output penjualan yang maka akan mendorong perekonomian. Selanjutnya pertumbuhan jumlah produksi akan dijelaskan pada gambar 1.3 dimana pertumbuhan jumlah produksi disini dilihat dari total PDRB sektor industri manufaktur di Jawa Barat.



Gambar 1.3

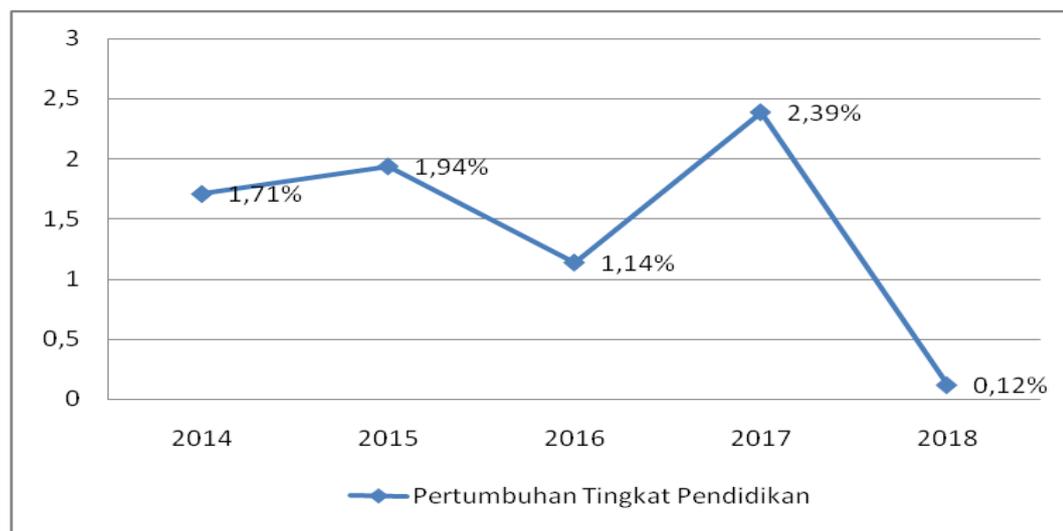
Laju Pertumbuhan Jumlah Produksi Dilihat Dari PDRB Sektor Industri Manufaktur Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2014-2018)

Pada Gambar 1.3 secara umum pertumbuhan jumlah produksi sektor manufaktur mengalami peningkatan dilihat dari nilai PDRB. Terjadi peningkatan pada tahun 2016 sebesar 4,77% atau sebesar Rp 181.322.612.00 dan pada tahun 2018 merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu tumbuh sebesar 6,49% atau sebesar Rp 203.422.453.00. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian semakin membaik dan industri manufaktur semakin besar dalam berkontribusi terhadap PDRB.

Faktor lain yang dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga

kerja yang bermutu tinggi, memiliki pola pikir dan cara bertindak yang lebih modern. Pendidikan yang relatif tinggi dan *skill* yang dimiliki tenaga kerja akan lebih dapat bersaing untuk bisa masuk kedalam perusahaan karena perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki *skill* untuk memperlancar produksi.



Gambar 1.4
Laju Pertumbuhan Tingkat Pendidikan Menurut Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2014-2018

Pada Gambar 1.4 laju pertumbuhan tingkat pendidikan menurut rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan tingkat pendidikan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2014-2018. Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan rata-rata lama sekolah mengalami penurunan yaitu sebesar 1,14% atau sebesar 7,95 tahun dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 sebesar 2,39% atau sebesar 8,14 tahun, namun pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 0,12% atau sebesar 8,15 tahun. Grafik diatas menggambarkan pertumbuhan tingkat pendidikan menurut rata-rata lama sekolah mengalami pertumbuhan walaupun tidak begitu besar, hal ini disebabkan karena

pemerintah terus memperhatikan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mengurangi jumlah anak putus sekolah sejak dini di Provinsi Jawa Barat.

Seiring dengan persaingan pasar tenaga kerja yang tiap tahunnya semakin meningkat, menyebabkan jumlah pencari kerja tingkat pendidikan semakin selektifnya, perusahaan dalam memilih tenaga kerja guna mendapatkan tenaga kerja yang mempunyai *skill* yang lebih tinggi untuk memperlancar dalam produksi.

Berdasarkan data dan adanya hasil pengamatan awal maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan serta mengkaji ulang variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Penelitian ini mengangkat 3 variabel bebas yaitu pertumbuhan upah minimum provinsi, pertumbuhan jumlah produksi dan pertumbuhan tingkat pendidikan. Untuk variabel terikatnya yaitu penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI JAWA BARAT TAHUN 2005-2018”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan upah minimum provinsi, pertumbuhan jumlah produksi, pertumbuhan tingkat pendidikan secara parsial terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan upah minimum provinsi, pertumbuhan jumlah produksi, pertumbuhan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan upah minimum provinsi, pertumbuhan jumlah produksi dan pertumbuhan tingkat pendidikan secara parsial terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan upah minimum provinsi, pertumbuhan jumlah produksi, pertumbuhan tingkat pendidikan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empirik, khususnya mengenai masalah pengangguran di Provinsi Jawa Barat

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi referensi dan menetapkan suatu strategi untuk pertimbangan dalam solusi untuk menanggulangi masalah penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi mengenai pertumbuhan upah minimum provinsi, pertumbuhan jumlah produksi, pertumbuhan tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Jawa Barat dan semoga menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya melalui pengambilan data dari website Badan Pusat Statistik yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dimulai sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, pembuatan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, analisis data, penyusunan skripsi dan sidang skripsi.

Berikut matriks jadwal penelitian:

Tabel 1.1
Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Keterangan	Tahun 2019																		
	Februari				Maret				April				Mei				Juni		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
Pengajuan Judul	■	■																	
Pengumpulan Data			■	■															
Pembuatan Usulan Penelitian					■	■	■	■											
Seminar Usulan Penelitian								■											
Revisi Usulan Penelitian									■	■	■	■							
Analisis Data											■	■							
Pengolahan Data												■	■						
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■	■	■	
Sidang Skripsi																		■	